

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2005). *Perencanaan daerah partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1).
- A'an, Dkk. (2022). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Basuki, U. (2016). Desa mawa cara negara mawa tata: Dinamika pengaturan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 13(2).
- Creswell, W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- F. Budi Hardiman. (2021). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fasli, J., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Habermas, J. (1996). *Between fact and norms* (William Rehg, Trans.). New Baskerville: MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1992).

- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi deliberatif Indonesia: Konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1).
- Hari, S. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2).
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: Model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Ikhlas, D., Yunaldi, W., & Syahril. (2023). Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang. *Open Law Journal*, 1(1).

- Kusuma, C. (2012). *Demokrasi deliberatif di era otonomi daerah: Studi kasus Forum Konstituen di Kabupaten Bandung* (Tesis). Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30–57.
- Mardiyanta, A. (2012). Analisis proses perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam perspektif kebijakan deliberatif (Studi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur).
- Muhsinah, L. (2023). *Komunikasi intersubjektif untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Islam Plus Az-Zahra Kota Depok* (Tesis Magister). Institut PTIQ Jakarta.
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3(1).
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhaera, Dkk. (2022). Efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kambu Kota Kendari. *REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional*.

- Rafinzar Rahmat, Dkk. (2021). Deliberative democracy dalam musyawarah rencana pembangunan desa (Studi pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). *Jurnal Moderat*, 7(3).
- Saragih, Dkk. (2022). Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2).
- Sri Ayu, Dkk. (2013). Pelaksanaan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.
- Sugiyah. (2001). *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo (38)
- Sukma, F. (2021). Menimbang demokrasi deliberatif dalam proses pembentukan hukum yang demokratis di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 1(3).
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Perencanaan pemangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Toar Kevin, Dkk. (2019). Efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).